



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR 65 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU**

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd.

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KENDARI

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
dan Muktam

Muhammad Rajab Buruto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI NOMOR 65 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN  
2025

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
TAHUN 2025**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM						
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Kendari	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari	September 2025	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, memsosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan melalui website KPU Kota Kendari	September 2025	1 (satu) Dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI tiap triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar money ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Per Triwulan	2 (dua) Dokumen
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBM/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja SR dan SS	September - Desember 2025	4 (empat) Dokumen
		Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kota Kendari	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kota Kendari mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja, mengadakan sosialisasi/gathering/pelatihan untuk konsolidasi tim	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	September 2025	1 (satu) Dokumen
Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi						
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi seluruh pegawai dan satker	Membrikan informasi dan pelatihan pengendalian ke seluruh KPU Kota Kendari. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, Undangan Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi	Oktober 2025	1 (satu) Kegiatan
			Sosialisasi Public Campaign	Notulensi, foto kegiatan, undangan Sosialisasi Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	November 2025	1 (satu) Kegiatan
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian Gratifikasi seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring	Banner "Tolak Gratifikasi" dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring Tampilan Website dan Media Sosial tentang Anti Korupsi dan Gratifikasi di KPU Kota Kendari	September - Desember 2025	4 (empat) Bulan
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kota Kendari membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Desember 2025	1 (satu) Laporan
4	Survei Persepsi Anti Korupsi KPU Kota Kendari	Tertelaksananya Survei Persepsi Anti Korupsi KPU Kota Kendari kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survei	Hasil Survei	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
Pelaksanaan Whistle Blowing System						
1	Internalisasi Whistle Blowing System dan penerapannya	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan Inovasi Sistem	Melakukan internalisasi Whistle Blowing System sebagai salah satu sistem pembangunan ZI. Pengaduan whistle blower akan dirahasiakan identitasnya	Memasang hotline khusus (call center), atau via surel; Sosialisasi Whistle Blowing System	September 2025	1 (satu) Kegiatan
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Menyusun daftar inventaris masalah, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan.	Daftar Inventaris Masalah, data tindak lanjut dari evaluasi penerapan Whistle Blowing System	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Menindaklanjuti atas penerapan Whistle Blowing System	Laporan tindak lanjut Whistle Blowing System	Progres implementasi Whistle Blowing System pada KPU Kota Kendari	Desember 2025	1 (satu) Kegiatan
Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kota Kendari						
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/pencegahan	Desember 2025	1 (satu) dokumen
2	Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kota Kendari berkoordinasi dengan inspektorat terkait dengan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	November 2025	1 (satu) Kegiatan

3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	September 2025	1 (satu) Dokumen
4	Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk mekanisme penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindaklanjut	Laporan Benturan Kepentingan (format berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015)	Desember 2025	1 (satu) Laporan
5	Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindaklanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindaklanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil indentifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindaklanjut yang sudah dilakukan	Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Desember 2025	1 (satu) Laporan
V						
Pembangunan SPIP dilingkungan unit kerja KPU Kota Kendari						
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan Inspektorat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikan kedalam aktivitas organisasi	Laporan kegiatan SPIP dan kartu kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, bukti pelaksanaan Sub Unsur pada lingkungan pengendalian	September-Desember 2025	1 (satu) Laporan
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko	September 2025	1 (satu) Laporan
			Menyebarkan kuesioner, merekapitulasi hasil kuesioner, membuat matrik kesimpulan, rencana perbaikan, form tindakan perbaikan	Laporan diagnosis awal	September 2025	1 (satu) Laporan
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko	Daftar kegiatan Pengendalian resiko dan contoh-contoh Bentuk Pengendalian	September - Desember 2025 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	September - Desember 2025 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen
			Menyebarkan kuesioner sampling kepada pejabat/pegawai dengan jumlah responden yang sudah ditentukan untuk mengukur proses penanaman nilai SPIP	Bukti penerimaan kuesioner, hasil pengukuran kepada kuesioner	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
VI						
Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU						
1	Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat	Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat hotline (call center) dan alamat surel aduan	Website KPU Kota Kendari, email pengaduan masyarakat KPU Kota Kendari melalui alamat email kota_kendari@kpu.go.id, Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor. - SOP - Call Center dan surel aduan - Banner - Kotak Pengaduan	September 2025	1 (satu) Dokumen
2	Tindaklanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindaklanjut DUMAS	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matrik rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah di proses	Infografis DUMAS	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matrik rekapitulasi jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti untuk dipublikasikan	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	September - Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Penyegaran kemampuan SDM dalam menghadapi pengaduan masyarakat	Workshop peningkatan penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Workshop	November 2025	
3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun dimasa tahapan pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
4	Tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi infografis	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
VII						
Inovasi Pelayanan						
1	Survey pelayanan publik	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kota Kendari kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil survey	Desember 2025	1 (satu) Laporan



Kendari, 8 September 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kendari

ttd

Jumwal Shaleh